

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan KSP Kopdit Bahtera Ende

Yulita Londa
Universitas Flores, Indonesia

Korespondensi Penulis : selolitalonda@gmail.com*

Abstract. *The aim of the study was to determine the Application of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in presenting the Financial Statements of KSP Kopdit Bahtera Ende. This type of research is descriptive research. The research location was carried out at KSP Kopdit Bahtera Ende, Jl. Prof.W.Z.John, Paupire Village, Ende, East Nusa Tenggara. Data collection techniques in this study are by using: Observation, Interview, Documentation, and Literature Study The application of SAK ETAP in the financial reports of KSP Kopdit Bahtera has generally implemented SAK ETAP and is in accordance with the rules and provisions of SAK ETAP, only one component of the financial report is missing, namely the Notes to the Financial Report. This is proven by the financial report as of 31 December 2023 presented by KSP Kopdit Bahtera.*

Keywords: *Implementation of Etap Sakti, Financial Reports, Financial Accounting*

Abstrak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam penyajian Laporan Keuangan Ksp Kopdit Bahtera Ende. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada KSP Kopdit Bahtera Ende, Jl Prof W.J Yohanes Kelurahan Paupire Ende Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka Penerapan SAK ETAP dalam Laporan keuangan KSP Kopdit Bahtera secara garis besar telah menerapkan SAK ETAP dan sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan SAK ETAP hanya tidak terdapat salah satu komponen laporan keuangan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan keuangan per 31 Desember 2023 yang disajikan oleh KSP Kopdit Bahtera.

Kata Kunci : Penerapan Sak Etap, Laporan Keuangan, Akuntansi Keuangan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 (1992) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu kumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar kepada semua orang sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha salah satunya yaitu usaha koperasi simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Dengan merujuk pada definisi tersebut maka sebagai lembaga keuangan dalam hal ini koperasi

memerlukan pencatatan akuntansi dalam menunjang usahanya. IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk diterapkan oleh entitas - entitas tertentu dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi merupakan salah satu entitas yang termasuk dalam kategori untuk menerapkan SAK ETAP. Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan. Sebagai unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi maka koperasi dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapainya dengan menyajikan laporan keuangan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu SAK ETAP.

Saat ini, Indonesia memiliki empat standar keuangan yaitu PSAK berbasis IFRS, PSAK syariah, Standar Akuntansi Pemerintah, dan SAK ETAP. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. SAK ETAP digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang pedoman umum Akuntansi Koperasi maka setiap Koperasi yang tidak memiliki Akuntabilitas publik, dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Laporan keuangan yang sesuai dengan standar pasti lebih dipercayai oleh pengguna laporan keuangan. Jika Koperasi membuat laporan yang sesuai standar, maka hal tersebut akan meningkatkan Akuntabilitas mereka dalam masyarakat.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar pelaporan akuntansi yang dibuat oleh IAI untuk mempermudah UKM dan Koperasi dalam menyusun laporan keuangannya Secara berkala perusahaan atau koperasi selalu menyediakan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan dibuat guna mengetahui kinerja keuangan dalam suatu periode. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Kelima jenis laporan tersebut memiliki fungsi dan peranan tersendiri dalam penyajian laporan keuangan pada suatu perusahaan atau koperasi. Biasanya setiap perusahaan atau koperasi memiliki kebutuhan masing-masing sehingga penggunaan laporan keuangan tersebut berbeda-beda.

Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya kesesuaian tiap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau koperasi dalam. Pedoman penyusunan laporan keuangan memudahkan pembaca laporan keuangan tiap perusahaan atau koperasi. Pedoman dalam penyusunan laporan keuangan koperasi menggunakan SAK ETAP. Standar akuntansi keuangan di Indonesia terdiri atas lima pilar yaitu Standar Akuntansi Keuangan Yang Berlaku Umum, SAK ETAP, SAK Syariah, SAK EMKM dan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh koperasi yaitu SAK ETAP akan menjadikan koperasi sebagai salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik yang patut diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia mengingat koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan salah satu badan usaha yang sangat berkembang di Indonesia. Hal itu juga didorong dengan anggapan bahwa perekonomian masyarakat yang baik akan mewujudkan perekonomian negara yang baik.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di KSP Kopdit Bahtera Ende adalah karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan masalah yaitu koperasi belum menyajikan salah satu komponen laporan keuangan yang berdasarkan ketentuan SAK ETAP yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Sehingga menyebabkan anggota koperasi tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang penyajian laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan SAK ETAP yang mengatur bahwa setiap entitas harus menyajikan secara lengkap berupa lima komponen laporan keuangan yaitu Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah adalah bagaimanakah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam penyajian Laporan Keuangan KSP Kopdit Bahtera Ende. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam penyajian Laporan Keuangan KSP Kopdit Bahtera Ende. Sedangkan pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini adalah KSP Kopdit Bahtera Ende, peneliti dan peneliti selanjutnya, serta bagi pengembangan ilmu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 (2012) Pasal 1 mengatakan bahwa koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni *cooperation*, *co* artinya bersama-sama sedangkan *operation* berarti usaha untuk mencapai tujuan. Dengan demikian secara etimologis koperasi dapat diartikan sebagai bersama untuk mencapai tujuan. Koperasi merupakan suatu lembaga keuangan berbadan hukum yang beranggotakan sekumpulan orang-orang yang berkepentingan bersama.

Menurut Jumaidi, L.T (2021) koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya. Sattar, (2017) Pada koperasi terdapat bentuk kerjasama yang bersifat sukarela, sebagai wadah atau perkumpulan dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang memiliki tujuan berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti mengembangkan usaha dan mengontrol aktivitas koperasi tersebut. Sehingga, keuntungan dan resiko koperasi ditanggung dan dibagi secara adil

Koperasi Indonesia memiliki landasan yang menjadi pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang menjadi landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan Koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 (1992) bahwa koperasi mempunyai empat fungsi, yaitu: membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; berperan serta secara aktif dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Jenis Koperasi dalam UU No 17 tahun 2012 pasal 82 setiap koperasi harus mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Jenis koperasi yang dimaKSP d

didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggota. Berikut terdapat beberapa jenis koperasi: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa, Koperasi Produsen. Sedangkan prinsip koperasi diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2012 pasal menyatakan bahwa koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya; Anggotanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; Anggota menyetorkan modal secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis.

Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2012 Bentuk koperasi di Indonesia ditentukan berdasarkan keanggotaan jenis koperasi. Perbedaan wilayah kerja dimiliki setiap tingkatan koperasi. Terdapat dua bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi Primer beranggotakan paling sedikit dua puluh orang. Koperasi ini merupakan kumpulan orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama, bukan kumpulan modal. Koperasi Sekunder mencakup semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan anggota koperasi primer dan koperasi sekunder atas dasar kesamaan tujuan efisiensi maupun kepentingan. Kabupaten atau kota, provinsi ataupun nasional merupakan wilayah kerja koperasi sekunder. Koperasi sekunder terdiri dari pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi.

Modal Koperasi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 (1967) modal koperasi terdiri dari Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan jumlahnya sama untuk semua anggota. Simpanan wajib yang diwajibkan kepada anggota yang membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus.

Akuntansi Koperasi

Pengertian Akuntansi Koperasi menurut (Rudianto, 2015) adalah suatu sistem pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna dan akurat dalam mengelola keuangan koperasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Koperasi. Laporan Keuangan Koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Laporan Keuangan Koperasi terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain: Dapat dipahami, relevan, materialitas, dapat dipahami Keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut (Kasmir, 2019) adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah laporan keuangan tersebut dianalisis. Menurut (Bahri, 2016) Laporan Keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. Menurut (Hery, 2015) Laporan Keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan. yang memilki kepentingan terhadap perusahaan.

Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan diantaranya adalah: pihak Manajemen Perusahaan dimana laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan; Pemilik Perusahaan dimana fungsi laporan keuangan digunakan untuk memberitahu keadaan perusahaan dari sisi keuangan; Investor dan Pemegang Saham, disini investor biasanya melihat laporan keuangan untuk mengambil keputusan penanaman; Kreditur atau pemberi hutang biasanya melihat kesehatan perusahaan dari laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan layak diberikan kredit atau tidak; Pemerintah, berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada; Karyawan, untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja.

SAK ETAP

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2018) SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP dimaksudkan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan; menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum bagi pengguna eksternal, contoh: pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP ini digunakan sebagai runtutan atas keputusan IAI dibawah Menteri Keuangan, atas penghapusan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi yang terhitung sejak 8 April 2011.

Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Laporan keuangan SAK ETAP yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia 2018) terdiri dari :

- **Neraca.** Menurut SAK ETAP paragraf 4.1 Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Pada paragraf 4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: Kas dan setara kas; Piutang usaha dan piutang lainnya; Persediaan; Properti investasi; Aset tetap; Aset tidak berwujud; Utang usaha dan utang usaha lainnya; Aset dan kewajiban pajak; Kewajiban diestimasi; Ekuitas
- **Laporan Laba Rugi.** Menurut SAK ETAP Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Menurut SAK ETAP Paragraf 5.3 Laporan laba rugi menyajikan pos-pos sebagai berikut: Pendapatan; Beban keuangan; Bagian laba atau rugi yang menggunakan metode ekuitas; Beban pajak; Laba atau rugi neto
- **Laporan Perubahan Ekuitas.** Menurut SAK ETAP Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi, dividen dan distribusi lain kepemilik ekuitas selama periode tersebut.
- **Laporan arus kas.** Laporan arus kas menurut SAK ETAP, Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- **Catatan atas laporan keuangan.** Catatan atas laporan keuangan menurut SAK ETAP memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi

Laporan Keuangan Koperasi adalah laporan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu koperasi pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal pada koperasi adalah Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan (Harahap, 2015: 105). Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi suatu koperasi dengan koperasi lainnya juga berbeda tergantung jenis koperasinya. Namun, setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas. Oleh karena itu, berikut ini adalah karakter spesifik di dalam laporan keuangan koperasi:

- Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus, yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan koperasi.
- Laporan keuangan koperasi dapat ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal.
- Laporan keuangan koperasi menjadi sumber informasi bagi anggota, untuk mengetahui: Prestasi unit kegiatan koperasi untuk anggotanya; Prestasi unit kegiatan koperasi untuk non-anggota; Informasi yang mempengaruhi stabilitas keuangan koperasi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017). penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang melukiskan, menggambarkan atau memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Jenis data adalah data kuantitatif dan kualitatif dan sumber datanya primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dievaluasi dengan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis adalah pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KSP Kopdit Bahtera menjalankan kegiatan usahanya dengan cara mengumpulkan dana dari anggota dalam bentuk tabungan maupun investasi berjangka dan didistribusikan kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Koperasi sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas publik mempertanggungjawabkan seluruh laporan kegiatan usahanya kepada anggotanya.

Dalam kegiatan transaksi keuangan KSP Kopdit Bahtera telah dikerjakan sesuai dengan prosedur pencatatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap transaksi keuangan langsung diterima oleh kasir dan dibuatkan bukti penerimaan (Slip Uang Masuk) atau bukti pengeluaran (Slip Uang Keluar) serta untuk transaksi non kas dibuatkan Slip Memo
2. Bukti penerimaan ditandatangani oleh kasir dan anggota, bukti pengeluaran ditandatangani oleh kasir, anggota dengan persetujuan manajer. Sedangkan transaksi non kas ditandatangani oleh kasir, kabid keuangan dan manajer.
3. Bukti penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam buku kas harian oleh kasir
4. Selanjutnya bukti-bukti tersebut disampaikan kepada Kabid Keuangan untuk diinput ke jurnal melalui program Sikopdit Cs yaitu aplikasi yang digunakan oleh gerakan Koperasi kredit seluruh Indonesia dalam menata laporan keuangannya.

Untuk mencegah terjadinya perbedaan data maka setiap akhir bulan selalu dilakukan pencocokan data keuangan antara kasir dengan kepala bidang keuangan. Proses tersebut dibuat dalam bentuk laporan posisi kas dan monitoring data. KSP Kopdit Bahtera telah membuat laporan keuangan yang dibutuhkan untuk melihat posisi keuangan dan sisa hasil usaha Koperasi selama periode tertentu.

Dalam menjalankan operasi kegiatan usahanya, KSP Kopdit Bahtera selalu melakukan pencatatan secara rutin lalu disajikan dalam laporan bulanan kepada pengurus dan pengawas dalam rapat gabungan bersama staf manajemen dan laporan tersebut juga disampaikan kepada seluruh anggota dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam laporan keuangan KSP Kopdit Bahtera yang disajikan dalam laporan keuangan hanya terdapat neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Dalam SAK ETAP ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan KSP Kopdit Bahtera seperti adanya pemisahan aset ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca, pengakuan biaya yang

merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban dalam laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan neraca KSP Kopdit Bahtera menunjukkan bahwa aset lancar, penyertaan/investasi dan aset tetap dicatat secara terpisah begitu juga dengan kewajiban yang dicatat kedalam kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Per 31 Desember 2023, yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang anggota dan aset lancar lainnya. Sedangkan aset tidak lancar yang terdiri dari penyertaan/investasi dan aset tetap bersih, sedangkan kewajiban lancar tercatat terdiri dari simpanan/tabungan anggota dan dana bagian SHU & lainnya, sedangkan kewajiban tidak lancar terdiri dari simpanan/tabungan jangka panjang, sedangkan ekuitas terdiri dari modal dan SHU tahun berjalan sehingga

Laporan perhitungan sisa hasil usaha KSP Kopdit Bahtera menunjukkan pemisahan pendapatan ke dalam pendapatan usaha dan pendapatan lainnya. Jumlah pendapatan KSP Kopdit Bahtera Tahun Buku 2023 dikurangi jumlah seluruh biaya di tahun buku 2023, dengan demikian selisih dari pendapatan dan biaya menghasilkan sisa hasil usaha.

Penyajian Laporan Keuangan KSP

Di bawah ini data mengenai Laporan Keuangan KSP Kopdit Bahtera Ende yang terdiri dari empat komponen laporan keuangan yaitu Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas untuk periode 31 Desember 2023

Tabel 1. KSP Kopdit Bahtera Ende Neraca Periode 31 Desember 2023

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS:	
ASET LANCAR:		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan Setara Kas	40.791.084.444	Simpanan/Tabungan Anggota	9.395.489.298
Piutang Anggota	23.049.646.080	Dana Bagian SHU & Lainnya	<u>528.028.880</u>
Aktiva Lancar Lainnya	279. 113. 932	KEWAJIBAN LANCAR	
Jumlah Aset Lancar	27. 407.868.456		9.923.518.178
		KWAJIBAN TIDAK LANCAR:	
		Simpanan /Tabungan Jgk. Panjang	19.499.101.039
ASET TIDAK LANCAR:		JUMLAH KEWAJIBAN	
Investasi / Penyertaan	7.548.757.985		19.499.101.039
Aset Tetap Bersih	4.532.218.507	EKUITAS:	
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.080.976.492	Modal	9.846.379.956
		SHU Tahun Berjalan	219.845.775
		JUMLAH EKUITAS	
			10.066.225.731
TOTAL ASET	39.488.844.948	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
			39.488.844.948

Sumber: Data KSP Kopdit Bahtera Ende

Tabel 2.KSP Kopdit Bahtera Ende Perhitungan Sisa Hasil Usaha Periode 31 Desember 2023

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA	31 Desember 2023
PARTISIPASI ANGGOTA	
Partisipasi Bruto Anggota /Pend. Usaha	
Beban Pokok	3.241.356.450
Jumlah Partisipasi Anggota /Pend. Usaha	(1.937.034.075)
Pendapatan Lainnya /NonUsaha	1.304.322.375
	427.392.139
SISA HASIL USAHA KOTOR	
BEBAN OPERASI	1.731.714.514
Beban Personalia	728.689.450
Beban Operasional/Adum	783.179.289
TOTAL BEBAN OPERASI	1.511.868.739
SELISIH HASIL USAHA	219.845.775

Sumber: Data KSP Kopdit Bahtera Ende

Tabel 3.KSP Kopdit Bahtera Ende Laporan Perubahan Ekuitas Periode 31 Desember 2023

Perkiraan	31 Desember 2021	Masuk	Keluar	31 Desember 2023
Simpanan Pokok	457.087.000	54.600.000	16.972.000	494.715.000
Simpanan Wajib	6.795.229.698	278.789.200	511.707.200	6.562.311.698
Dana Cadangan	2.764.140.510	25.212.748	-	2.789.353.258
SHU Tahun Berjalan	212.073.411	219.845.775	212.073.411	219.845.775
JUMLAH	10.228.530.619	578.447.723	740.752.611	10.066.225.731

Sumber: Data KSP Kopdit Bahtera Ende

Tabel 4.KSP Kopdit Bahtera Ende Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	219.845.775
Penyusutan Aset Tetap	259.237.817
SHU Setelah Penyusutan	479.083.592
Penurunan Piutang Anggota	552.043.136
Penurunan Aset Lancar Lainnya	11.453.998
Kenaikan Tab. / Simpanan Anggota	905.618.341
Penurunan Dana Bagian SHU dan Lainnya	(601.253.441)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	867.862.034
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Kenaikan Penyertaan / Investasi	(477.009.815)
Kenaikan Aset Tetap	(372.350.000)
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(849.359.815)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kenaikan Simpanan /Tab. Jk. Panjang	1.110.314.294
Penurunan Modal /Simpanan Anggota	(170.077.252)
Pembagian SHU Tahun Lalu	(212.073.411)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	728.163.631
KENAIKAN KAS BERSIH DAN SETARA KAS	1.225.749.442
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.853.359.002
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4.079.108.444

Sumber: Data KSP Kopdit Bahtera Ende

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penyajian laporan keuangan yang disediakan oleh KSP Kopdi Bahtera Ende untuk periode 31 Desember 2023 hanya terdapat empat komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Laporan Arus Kas sedangkan tidak terdapat Komponen Laporan Keuangan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Neraca

Neraca KSP Kopdit Bahtera terdiri dari pos-pos berikut ini:

1. Aset

KSP Kopdit Bahtera telah menyajikan aset di dalam neraca sesuai dengan SAK ETAP yakni berdasarkan likuiditasnya yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Hal ini dirasa lebih informatif bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi anggota Koperasi ketika mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan oleh pengurus setiap tahunnya. Penyajian aset yang dilakukan KSP Kopdit Bahtera adalah aset disajikan disisi debit atau kiri dalam neraca, aset juga telah diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Berikut ini adalah penjelasan dari akun-akun aset lancar yang ada di dalam neraca.

- Kas dan Setara Kas yang terdiri dari kas yang di Koperasi dan di Bank NTT.
- Piutang Anggota.
- Persediaan
- Penyertaan/ Investasi
- Aset Tetap.

Aset tetap yang ada pada KSP Kopdit Bahtera awalnya dicatat sebesar biaya perolehan aset tetap yang meliputi harga beli, pajak, biaya angkut dan biaya-biaya sampai aset tetap siap digunakan dalam kegiatan operasional koperasi. Selanjutnya KSP Kopdit Bahtera melakukan penaksiran atas masa manfaat aset tetap, dalam artian KSP Kopdit Bahtera melakukan penyusutan terhadap aset tetap. KSP Kopdit Bahtera menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) untuk menghitung penyusutan atas aset tetap koperasi. Jadi aset tetap memiliki batas masa pemakaian kecuali tanah yang masa manfaatnya tidak terbatas.

2. Kewajiban.

KSP Kopdit Bahtera menyajikan kewajiban di dalam neraca berdasarkan likuiditas pos kewajiban yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Hal ini dirasa lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan mengingat kegiatan utama yang dilakukan Ksp Kopdit Bahtera berupa usaha jasa. Dalam penerapannya KSP Kopdit Bahtera, memiliki kewajiban lancar yang mencakup simpanan/tabungan anggota yang terdiri dari sibuhar, sisuka dan sisima. Dana bagian SHU & lainnya yang terdiri dari hutang bunga sikap, dana fungsionaris, dana pembangunan.daerah kerja, hutang pajak, dana diklat/ pengembangan, dana stabilitas, Ekuitas

yang terdiri dari modal anggota, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, SHU Tahun Berjalan.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Akun-akun laporan perhitungan sisa hasil usaha yang disajikan oleh KSP Kopdit Bahtera sebagai berikut :

1. Pendapatan

Penyajian pendapatan dalam laporan keuangan KSP Kopdit Bahtera terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan lainnya. Pendapatan usaha diperoleh dari bunga pinjaman dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pendapatan lainnya bersumber dari bunga bank.

2. Beban

KSP Kopdit Bahtera diakui dalam laporan laba rapabila terjadi penurunan masa manfaat masa ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Penyajian beban dalam laporan Perhitungan Hasil Usaha yang dibuat oleh KSP Kopdit Bahtera, beban diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu beban personalia dan beban operasional/Administrasi umum.

Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam penyajian laporan perubahan ekuitas yang dilakukan oleh KSP Kopdit Bahtera mengakui transaksi yang terjadi berdasarkan akrual basis dan pada dasarnya penyusunan laporan perubahan ekuitas hampir sesuai dengan laporan yang perubahan ekuitas yang dikeluarkan oleh SAK ETAP. Karena dalam penyajian laporan perubahan ekuitasnya sudah meliputi saldo laba pada awal periode dan pengurangan SHU tahun berjalan.

Laporan Arus Kas

KSP Kopdit Bahtera dalam menyajikan laporan arus kas berdasarkan aktivitas operasi itu dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini SHU positif atau negatif neto harus disesuaikan dengan mengkoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi di masalahu maupun di masa mendatang, dan juga unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

Sedangkan KSP Kopdit Bahtera dalam menyajikan arus kas berdasarkan aktivitas investasi dan pendanaan yaitu berdasarkan pemisahan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran bruto yang ada pada aktivitas investasi dan pendanaan.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam hal ini KSP Kopdit Bahtera tidak membuat atau memiliki catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangannya. Karena suatu laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP harus memiliki catatan atas laporan keuangan, sedangkan KSP Kopdit Bahtera tidak memiliki catatan atas laporan keuangan sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi secara jelas dan terperinci bagi para pengguna laporan keuangan yakni para anggota dalam memahami laporan posisi keuangan.

Membandingkan Sistem Laporan Keuangan KSP KOPDIT BAHTERA dengan SAK ETAP.

Secara keseluruhan perbandingan penyajian laporan keuangan antara KSP Kopdit Bahtera dengan SAK ETAP dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Laporan Keuangan KSP KOPDIT BAHTERA Dengan SAK ETAP

Item Dibandingkan	Yang	SAK ETAP (IAI, 2018)	KSP Kopdit Bahtera	Keterangan
PENYAJIAN				
		Penyajian Wajar	Telah berusaha menyajikan laporan secara wajar, jujur berdasarkan transaksi, dan diukur menurut kriteria pengakuan yang sudah ditetapkan	Sesuai
		Kepatuhan Terhadap SAK ETAP	Telah Menerapkan SAK ETAP	Sesuai
		Kelangsungan Usaha	Menyajikan Analisis Tingkat Kesehatan (likuiditas, rasio kas, solvabilitas, rentabilitas dan kecukupan modal	Sesuai
		Frekuensi	Rutin Mengeluarkan Laporan Keuangan Tahunan Yang Terintegral Dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan	Sesuai
		Penyajian Yang Konsisten	Pos-Pos Yang Disajikan Oleh KSP KOPDIT BAHTERA Tahun 2021-2022 Konsisten	Sesuai
		Informasi Komparatif	Telah Menyajikan Secara Komparatif Untuk Laporanannya	Sesuai
KEBIJAKAN AKUNTANSI				

	Menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Hanya Menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi (Perhitungan Sisa Hasil Usaha), Laporan Perubahan Ekuitas Dan Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (Tidak Ada)	Tidak Sesuai
	Disusun Berdasarkan SAK ETAP yang berlaku	Telah Menerapkan SAK ETAP	Sesuai
PENGUKURAN			
Kas dan setara kas	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar	Sesuai
Aktiva tetap	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar 4. Metode Penyusutan yang digunakan: a. Garis Lurus b. Saldo Menurun c. Jumlah Unit Produksi 5. Dasar Perhitungan : Per setahun dan dihitung mulai tanggal perolehan umur ekonomis : gedung dan kios 20 tahun 5%, kendaraan 10 tahun 10%, peralatan kantor 4 tahun 20%	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar 4. Metode Penyusutan Yang Digunakan Adalah Garis Lurus 5. Dasar Perhitungan Per Setahun dan Dihitung Mulai Tanggal Perolehan Umur Ekonomis : bangunan 20 tahun 5%, kendaraan 8 tahun 12,5%, aktiva tak berwujud 4 tahun 25%, inventaris kantor 4 tahun 25%	Sesuai
PENDAPATAN			
	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar	Sesuai
BIAYA PEMBAYARAN	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar	1. Berbasis Akrual 2. Biaya Historis 3. Nilai Wajar	Sesuai
PEMBAGIAN SHU	UU Perkoperasian : pembagian SHU menurut AD dan ART	UU Perkoperasian : pembagian SHU menurut AD dan ART	Sesuai
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN NERACA			
	Kas dan setara kas	1. Kas 2. Bank	Sesuai
	Piutang dan piutang lainnya	Piutang anggota	Sesuai
	Persediaan	Tidak ada persediaan	
	Properti investasi	Tidak ada properti investasi	Tidak sesuai
	Aset tetap	1. Kendaraan 2. Inventaris 3. Akm. Peny kendaraan 4. Inventaris 5. Akm. Peny inventaris	Sesuai
	Aset tidak berwujud	1. Jaringan internet	Sesuai
	Utang usaha dan utang lainnya	Utang Usaha dan Utang Lainnya (Tidak Ada)	Sesuai
	Aset dan kewajiban pajak	ada kewajiban pajak atas bunga simpanan sukarela anggota	Sesuai

	Kewajiban diestimasi	Tidak dijelaskan kewajiban diestimasi dalam neraca	Tidak sesuai
	Ekuitas 1. Simpanan pokok 2. Simpanan wajib 3. Cadangan umum 4. SHU Tahun Berjalan 5. Modal penyertaan 6. Modal sumbangan	Permodalan meliputi 1. Simpanan pokok 2. Simpanan wajib 3. Cadangan umum 4. SHU Tahun Berjalan 5. Modal Penyertaan (Tidak Ada) 6. Modal Sumbangan (Tidak Ada)	Sesuai
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA			
	Pendapatan	1. Pendapatan usaha 2. Pendapatan lainnya	Sesuai
	Beban keuangan	1. Beban pokok 2. Beban operasi yaitu beban personalia dan beban administrasi dan umum	Sesuai
	Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas (SHU sebelum pajak)	SHU Tahun berjalan sebelum pajak	Sesuai
	Beban pajak	Ada beban pajak yakni pajak atas simpanan di Bank	Sesuai
	SHU Setelah Pajak	Tidak disajikan SHU setelah pajak	Tidak sesuai
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Laba atau rugi entitas untuk suatu periode		Sesuai
	Pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut		Sesuai
	Koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi		Sesuai
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN ARUS KAS			
	Aktivitas operasi	1. SHU Sebelum pajak 2. Penyusutan aset tetap 3. SHU setelah penyusutan 4. Penurunan dana bagian SHU dan lainnya	Sesuai
	Aktivitas investasi	1. Kenaikan penyertaan/ investasi 2. Kenaikan aset tetap	Sesuai
	Aktivitas pendanaan	1. Kenaikan simpanan/tabungan jangka panjang 2. Penurunan modal/simpanan anggota 3. Pembagian SHU tahun lalu	Sesuai
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
	Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan	Tidak dibuat	Tidak sesuai
	Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP	Tidak dibuat	Tidak sesuai

	tetapi tidak disajikan di dalam laporan keuangan		
	Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk disajikan agar laporan keuangan dapat dipahami	Tidak dibuat	Tidak sesuai

Sumber Data: Peneliti 2023

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan SAK ETAP dalam Laporan keuangan KSP Kopdit Bahtera secara garis besar telah menerapkan SAK ETAP dan sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan SAK ETAP hanya tidak terdapat salah satu komponen laporan keuangan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan keuangan per 31 Desember 2023 yang disajikan oleh KSP Kopdit Bahtera. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan, bagi KSP Kopdit Bahtera diharapkan dapat terus menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dengan baik dan sesuai. Untuk periode selanjutnya diharapkan untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), karena catatan atas laporan keuangan merupakan unsur yang penting dalam laporan keuangan. Apabila Ksp Kopdit Bahtera membuat CALK maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain sebagai berikut: Gambaran Umum Perusahaan atau Koperasi, Perijinan, Keanggotaan, Kebijakan Akuntansi yang digunakan. Sedangkan bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dengan periode yang lebih panjang untuk meningkatkan keakuratan dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2016). Pengantar Akuntansi 1 (Edisi Pertama). CV. Andi Offset.
- Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (Edisi III). Andi Publisher.
- Berlian, R. J., Dwi Iga Luhsari, & Bambang Ismanto. (2020). SAK ETAP: Evaluasi Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 67–78.
- Harahap, S. S. (2015). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (Edisi Pertama, p. 105). PT Rajagrafindo Persada.
- Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan (p. 244). CAPS (Center for Academic Publishing Service).

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2018. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Jumadi, L. T. (2021). Akuntansi Koperasi. Peneleh Penerbit.
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Pertama). Kharsima Putra Utama Offset.
- Kasmir. (2019). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (p. 214). Rajagrafindo Persada.
- Murni, M., Silvester Saman, & Syarifuddin Syarifuddin. (2020). Evaluasi Penerapan SAK ETAP terhadap Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Kredit Sukadamai Kabupaten Manggarai Barat. *Accounting Journal*, 1(2), 190–197.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Akuntansi Simpan Pinjam oleh Koperasi No. 12 Tahun 2015.
- Rudianto. (2015). Akuntansi Koperasi (Edisi Ketiga). Erlangga.
- Sattar. (2017). Ajari Ekonomi Koperasi. Deepublish Publisher.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1967). Nomor 12 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (p. 20).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1992). Nomor 25 Tentang Perkoperasian Indonesia. Presiden Republik Indonesia, 25, 1–57.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). Nomor 17 Tentang Perkoperasian. Presiden Republik Indonesia, 1(1), 65.